



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340-INDONESIA  
Telp: +62 21 23951100 | Fax: +62 21 3914162 | Email: kemenkomaritim@maritim.go.id

---

---

Nomor : B-94/D1.1/DE.01.00/X/2024 15 Oktober 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Pemberitahuan Pembukaan Pelaporan Pelaksanaan  
Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun  
2021-2025 Untuk Pelaporan B09 Tahun 2024

Yth.

**Daftar Terlampir**  
di tempat

Merujuk perihal surat diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021 – 2025 telah ditetapkan Presiden pada 22 Februari 2022. Dalam lampiran Perpres tersebut terdapat tabel Rencana Aksi yang terdiri dari berbagai program/kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab yang perlu dilaksanakan dan dilaporkan perkembangannya.
2. Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (3) mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi.
3. Sebagaimana mekanisme pelaporan kegiatan dalam Renaksi KKI yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, maka pada Pelaporan Renaksi KKI Tahun 2021-2025 untuk Tahun 2024 akan tetap menggunakan mekanisme yang sama dengan menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev 2.0) milik Kantor Staf Presiden (KSP).
4. Kami informasikan bahwa laporan pelaksanaan kegiatan Renaksi KKI untuk target B09 Tahun 2024 telah dibuka dan sudah dapat di *input* kedalam aplikasi Sismonev 2.0 KSP dengan melakukan klaim angka persentase capaian kegiatan pada B12 dan mengunggah data dukung laporan melalui akun Sismonev yang dimiliki oleh Biro/Unit Perencanaan pada masing-masing Kementerian/Lembaga mulai tanggal 15 Oktober 2024 dan akan ditutup pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB.
5. Klaim angka persentase capaian kegiatan pada B09 dan data dukung yang dilaporkan oleh masing-masing K/L akan dilakukan verifikasi oleh tim POKJA/Verifikator yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode verifikasi yang akan dilaksanakan setelah batas waktu pelaporan ditutup.
6. Panduan tata cara penginputan laporan oleh masing-masing K/L dapat dilihat dan diunduh pada tautan <https://bit.ly/PanduanMonevKKI>

7. Sesuai amanat Pasal 5 ayat (3), Laporan tertulis hasil pemantauan dan evaluasi akan dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Presiden minimal 1 (satu) kali dalam se-tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Ketua Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan  
Indonesia Tahun 2021-2025,

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Jodi Mahardi

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan;
6. Tim POKJA.

Catatan: \*Narahubung:

- Chandra Hermawan (0811-800-743)
- Wisnu Murti (0877-3003-3737)
- Amanda Disa (0813-8314-4963)

## Lampiran Surat

Nomor : B-94/D1.1/DE.01.00/X/2024  
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 Untuk Pelaporan B09 Tahun 2024  
Tanggal : 15 Oktober 2024

### DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
22. Sekretaris Kementerian Pariwisata/Barekraf;
23. Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM;
24. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
25. Asisten Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
26. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia;
27. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia;
28. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
29. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
30. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
31. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA);
32. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
33. Sekretaris Utama Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
34. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
35. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
36. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN);
37. Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
38. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
39. Sekretaris Utama Lembaga Arsip Nasional (ANRI);
40. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
41. Sekretaris Utama Lembaga Badan Kepegawaian Negara (BKN).